

Andalas Journal of International Studies



Anita Afriani Sinulingga dan Ranny Emilia

Buruh Migran Indonesia Dalam Diplomasi Multi-jalur

Agung Setiyo Wibowo

Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study

Ziyad Falahi

Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah

Yusnarida Eka Nizmi

Citra dan Kriminalisasi Terhadap Kaum Perempuan di Bosnia, Herzegovina, dan Negara-Negara Tetangga Pada Periode 1992- 1995

Debby Rizqie

Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC

Adi Mulia Pradana

Melihat Kembali Sekuritisasi Palestina-Israel

Andalas Journal of International Studies	Volume 2	No 1	Halaman 1-108	Padang May 2013	ISSN 2301-8208
--	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Studies
International Relations Department
Faculty of Social and Political Science
Andalas University**

Andalas Journal of International Studies

ISSN : 2301 - 8208

Published by
Andalas Institute of International Studies – ASSIST
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Padang

Editor in Chief : Haiyyu Darman Moenir
Editorial Board : Ranny Emilia, Yopi Fetrian, Apriwan
Associate Editors : Virtuous Setyaka, Zulkifli Harza, Muhammad Yusra
Design/ lay out : Ardila Putri, Trio Sirmareza
Editorial Advisory Board : Kim So-il (Busan University of Foreign Studies)
Abu Bakar Eby Hara (University Utara Malaysia, Universitas
Jember)
Philip Vermonte (CSIS Jakarta)
Ari Bainus (Universitas Padjajaran)
Muhammad Yunus (Universitas Airlangga)

Editorial Office : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266,
Homepage : <http://ajis.fisip.unand.ac.id/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST and contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes papers which have never been published. Submit your paper to our editorial office in conditional, typed in A4 paper format, consisting 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Andalas Journal of International Studies

Volume 2, No. 1, May 2013

ISSN 2301 – 8208

Buruh Migran Indonesia Dalam Diplomasi Multi-jalur	1
Anita Afriani S dan Ranny Emilia	
Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study	14
Agung Setiyo Wibowo	
Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah.....	32
Ziyad Falahi	
Citra dan Kriminalisasi Terhadap Kaum Perempuan di Bosnia, Herzegovina, dan Negara- Negara Tetangga Pada Periode 1992- 1995	53
Yusnarida Eka Nizmi	
“Efektivitas Mekanisme REDD (<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC ..	75
Debby Rizqie	
Melihat Kembali Sekuritisasi Palestina-Israel	98
Adi Mulia Pradana	

PREFACE

With the biggest gratitude to God the Almighty, Andalas Journal of International Studies (AJIS) presents the second volume in 2013. Our goal in published this journal is to disseminate the results of the researchers' works with various topics and approaches in order to contribute to the development of International Studies both theoretically and practically.

Six articles are presented in this journal. The first article, written by Anita Afriani Sinulingga and Ranny Emilia, is entitled by Indonesian Migrant Workers in Multi-Track Diplomacy. The purpose of this writing is to operationalize the concept of multi track diplomacy in an attempt to enforce the role of migrant workers as a non-diplomatic group to further strengthen Indonesia's diplomatic posture. As an agent of the third-track diplomacy, this writing will further describe the role of migrant workers as the foundation of diplomatic strength.

The second article, Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study is written by Agung Setiyo Wibowo. Wibowo tries to initiate a study related to diaspora in Indonesia due to its unlimited potential contribution. The next article entitled by Significance of Moderate Islamic Diplomacy within Susilo Bambang Yudhoyono Administration in Responding Middle East Security Problem. The article is the work of Ziyad Falahi which tries to describe moderate Islam which is merely became a symbol Indonesian Diplomacy instead of a burden of Indonesian Diplomacy itself.

The fourth article, written by Yusnarida Eka Nizmi, is entitled by Image and Criminalization against Women in Bosnia, Herzegovina, and Their Neighbor Countries during the 1992-1995 periods. The article mainly discusses about the politicization of women's right in the prolonged conflict. The next paper is written by Deby Rizqie which attempts to answer the questions regarding the effectivity of the REDD mechanism. The international regime theory approach is used, which focuses on the theory of regime effectiveness, implementation concept and compliance The last article is entitled by Looking Back Israel-Palestine Securitization. The article is written by Adi Mulia Pradana.

We are very grateful to all the authors who contributed in providing the science and knowledge so that in the end of this journal can be published. Expectations of our papers presented in this paper can enrich and deepen the realm of scientific issues and in particular in the study of international relations.

Finally, we would also like to thank the editorial board who has worked hard in the preparation of this paper so in the end it can go up to journal printed.

Editorial Team

Citra dan Kriminalisasi Terhadap Kaum Perempuan di Bosnia, Herzegovina, dan Negara-Negara Tetangga Pada Periode 1992- 1995

Yusnarida Eka Nizmi

Abstrak

Ditinjau dari aspek sejarah, perempuan telah lama menjadi topik pembicaraan dalam kompetisi gender dan rasis, korban sekaligus objektifikasi yang eksotik. Sering dianggap sebagai “penjaga warisan,” perempuan sekaligus menjadi simbol tidak adanya perubahan dalam budaya itu sendiri-statis dan tidak berkembang, serta tidak terbuka pada perubahan. Patologi yang salah mengenai perempuan semakin melekatkan perempuan jauh dari “rasa aman”. Cap korban dilekatkan pada perempuan yang identik dengan cerita-cerita pemaksaan dan pemerkosaan yang menjadi simbol penekanan dan frustrasi kaum perempuan. Sejarah Bosnia-Herzegovina adalah satu bahasan dalam kajian politik gender. Hak-hak kaum perempuan terus menerus dipolitisasi, dalam konflik yang berkepanjangan. Upaya pencitraan terhadap perempuan telah dibuat dalam beberapa tahapan kritis. Masing-masing periode membawa persepsi sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang ada pada saat itu. Dan setiap periode pelabelan citra ini, khususnya yang terkait dengan hak-hak kaum perempuan, kerap menemui resistansi dari pihak-pihak tertentu. Citra perempuan, khususnya selama periode perang 1992-1995 di Bosnia, Herzegovina, dan negara-negara tetangga, merefleksikan politik etnonasional dan kepentingan ideologi pada masa itu yang berujung pada hilangnya rasa aman bagi kaum perempuannya.

Key-Words: *Citra, Perempuan, Kekerasan, Rasa Aman.*

PENDAHULUAN

Tulisan ini diawali dengan membicarakan status dan peran perempuan Balkan dalam kehidupan publik, dimulai pada tahun 1956-tahun di mana mereka menjadi pembicaraan. Bagian pertama akan mengulas konteks sosiopolitik, menggambarkan bagaimana hak kaum perempuan di Bosnia dan Herzegovina

dibingkai dengan citra yang dominan sebagai “pekerja”, “proletarian”, dan menghormati “Komunis”. Perlu dicatat bahwa “sisi keibuan” adalah citra yang diungkapkan oleh kaum sosialis egalitarian yang mengidentifikasi dan menekan populasi kaum perempuan. Bagian kedua membahas periode perang (1992-1995) dan peran ideologi etnonasional dalam membangun citra baru perempuan, seperti,

“Ibu Bangsa,” “Ibu Tanah Air,” “Heroin Bangsa,” “Harga Diri Bangsa,” dan “Paradigma Etnis” (perempuan dianggap sebagai pelindung kehormatan etnis bangsa). Bagian ketiga mengulas mengenai kekerasan-berdasar gender, khususnya pemerkosaan dan tindakan penyimpangan seksual lainnya, yang terbukti sangat berhasil menghancurkan tubuh perempuan dan berarti menghancurkan “tubuh” negara bangsa. Kekerasan berdasarkan gender secara efektif mentransformasi citra perempuan dari sebagai “Harga Diri Bangsa” menjadi “Aib Bangsa”.

PEMBAHASAN

Citra Perempuan di Yugoslavia, 1945-1990

Setelah Perang Dunia II, *Socialist Federal Republic of Yugoslavia* (SFRY)-Republik Sosialis Federal Yugoslavia berdiri. Republik baru ini, didirikan berdasarkan konsep dan ideologi politik sosialis, yang kemudian menjadi pusat

industrialisasi massal dan urbanisasi. Pada faktanya, pertumbuhan ekonomi Yugoslavia cukup baik dibandingkan negara-negara sosialis di Eropa Timur. Konstitusi dan kerangka kerja negaranya menawarkan kesempatan yang sama antara pria dan wanita di setiap sisi kehidupan, termasuk representasi di dunia politik. Dari awal berdirinya Republik Yugoslavia, pengawasan konstitusional diikuti oleh aktivitas yang intens oleh kaum perempuan di Partai Komunis (*Communist Party*). Gerakan perempuan yang paling dikenal pada masa itu adalah *Antifascist Front of Women* (AFW). Tujuan utama pendiriannya adalah membasmi buta huruf dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik.

Citra baru perempuan: proletarian menggambarkan bahu-membahu dengan kaum pria. Citra perempuan membangun pabrik, jalan, jalur kereta api, dan membangun kelas pekerja menjadi sesuatu yang umum. AFW sukses menggabungkan

perempuan di seluruh visi egalitarian. Namun, kedekatan AFW terhadap Partai Komunis menghasilkan pembatasan-pembatasan ruang geraknya dalam bertindak. Faktanya, Partai Komunis justru menggunakan AFW sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuatan revolusioner, memobilisasi sejumlah perempuan untuk membangun republik baru dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang menumpuk.³⁸ Konsekuensinya adalah, AFW kehilangan otonomi dan kemampuannya untuk fokus terhadap isu-isu perempuan, dan lebih menjadi eksekutor tujuan-tujuan politik Partai Komunis.³⁹

Berkembangnya birokrasi Komunis, dengan munculnya sejumlah cabang dan departemen yang diperuntukkan untuk penerapan tujuan-tujuan partai menjadikan masalah sebenarnya yang dihadapi oleh kaum

perempuan justru diabaikan. Selama sepuluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, AFW dibubarkan. Pengamat gerakan AFE, Neda Bozinovic, mengamati bahwa patriarki, berkontribusi terhadap bubarnya AFW. Kesimpulan yang didapat dari jatuhnya AFW adalah: dianutnya patriarki, membuat sulit bagi orang untuk menerima perempuan sejajar dengan yang lain. Meskipun sosialisme memproklamkan kesetaraan untuk perempuan, namun tetap harus berada dibawah “kontrol kami”- yakni kontrol dari Partai Sosialis.⁴⁰

Meskipun kesetaraan gender secara formal telah dijamin, namun dalam realitanya sistem patriarkilah yang justru diterapkan, yang mengatur perempuan untuk tetap berada diluar politik dan kekuasaan dan “di luar lingkaran pengambilan keputusan”.⁴¹ Untuk mengkonfirmasi validitas dari pernyataan

³⁸Marija Divicic, *Organizacija antifasistickog fronta zena u Socijalistickoj Jugoslaviji* (Organization of AFW in Sarajevo in Socialist Yugoslavia) (Sarajevo: Historical Archive, 1988), 295- 296.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Gordana Stojakovic, *Neda: jedna biografija* (Neda: A Biography) (Novi SAD: Futura Publikacija, 2002), 48.

⁴¹ Markov Slobodanka, *Polozaj i uloga zena? U sistemu politickog odlucivanja* (Status and Role of Women in the Political Decision- Making System) *Sema*, no. 3 (1984): 54.

ini, seseorang hanya perlu menganalisis data statistik mengenai representasi kaum perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik pada masa itu. Selain tidak adanya akses yang berimbang untuk semua posisi dalam ketenagakerjaan, agenda hirarki patriarki beroperasi secara sistematis mempromosikan dikotomi gender. Hasilnya adalah sebuah “pengkotakan feminisasi”. Dengan kata lain, anak-anak perempuan dikerahkan untuk menghadiri sekolah-sekolah yang memang disediakan untuk penempatan-penempatan perempuan (seperti: pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial). Pekerjaan-pekerjaan ini memberikan banyak waktu dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk merawat keluarga mereka. Menjaga anak dan rumah tidak dapat dibantah lagi sebagai kewajiban alami kaum perempuan. Perempuan dan aktivitas rumah tangga disimbolkan sebagai kodrat alami⁴²

Dalam suatu upaya untuk merekonsiliasi kehidupan pribadi dan publik mereka, perempuan diterima bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang sedikit tuntutan dan juga menerima pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pekerja pria. Hasilnya adalah “kemiskinan feminisasi” dan ekonomi kaum perempuan menjadi bergantung pada kaum pria. Antara tahun 1964 dan 1969, perempuan menempati sektor pendidikan sebanyak 51.7 persen, 62 persen di bidang pelayanan kesehatan, dan 54 persen di pelayanan sosial.⁴³ Pada tahun 1980an jumlah tersebut meningkat 60 persen, 73 persen, dan 78 persen.⁴⁴ Statistik ini menunjukkan bahwa perempuan umumnya diarahkan pada pekerjaan alaminya seperti pengurusan rumah dan merawat orang. Para perempuan yang bekerja di sektor kedua yakni industri tekstil “biasanya harus berlutut dengan teknologi usang, struktur pendidikan yang lebih rendah, dan

⁴² Sherry B. Ortner, “Is a Female to Male as nature Is to Culture?” in *Women, Culture and Society*, ed. M.Z. Rosaldo and L. Lamphere (Palo Alto, CA : Stanford University Press, 1974), 87.

⁴³ *Statistical Yearbook of SR Bosnia i Herzegovina*, 1970, 61.

⁴⁴ *Statistical Yearbook of SR Bosnia i Herzegovina*, 1989, 83- 84.

tentu saja upah dan gaji yang lebih rendah juga.”⁴⁵

Perempuan yang berpartisipasi dalam kehidupan politik, menempati 5 sampai 6 persen dari pemilihan politik dari tahun 1953 sampai dengan 1969⁴⁶ dan 15 sampai dengan 24 persen antara tahun 1974 dan 1986, periode selama sistem perwakilan diperkenalkan di awal pembentukan Yugoslavia.⁴⁷ Meskipun perempuan secara formal memiliki hak untuk terlibat dalam pendidikan, bekerja dan berpartisipasi penuh dalam politik, namun mereka tidak bisa melepaskan diri dari perangkap patriarki. Budaya patriarki, norma dan nilai-nilai tradisionalnya, masih berakar kuat dalam kehidupan keluarga dan hubungan sosial. Lidija Sklevicky mengungkapkan bahwa: nilai-nilai emansipasi yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang melekat pada

kodrat perempuan dalam budaya didefinisikan oleh tradisi dan peran sosial kaum perempuan membuat perempuan tidak dapat masuk dalam proses revolusi sosial dan jelas mempengaruhi representasi perempuan dalam politik.⁴⁸

Karena pandangan ini, perempuan cenderung menganggap pekerjaan mereka sebagai suatu pelengkap dibandingkan sebagai sebuah kesempatan untuk memenuhi keinginan dan bukti sebagai pribadi yang potensial. Karena mayoritas perempuan terkungkung dalam kewajiban-kewajiban dalam tingkat domestik (rumah tangga), mereka berjuang antara keluarga dan karir, menimbulkan kondisi yang dilematis bagi mereka. Perempuan dibesarkan dan dilatih untuk menjadi ibu dan istri. Hanya jika mereka melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada mereka sebagai ibu/istri dengan benar, maka mereka akan mendapatkan “hak moral” untuk diterima sebagai pekerja di sistem sosialis Yugoslavia. Perempuan

⁴⁵ Stipe Suvar, *Diskusija u raspravi: Društvena svest, marksistička teorija i emancipacija žena-danas* (Discussion in Debate: Social Consciousness, Marxist Theory and Emancipation of Women Today), *Zena (Woman)*, 1989, 23 : 32.

⁴⁶ *Statistical Yearbook of SR Bosnia i Hercegovina*, 1989, 23: 32.

⁴⁷ *Ibid*, 32- 33.

⁴⁸ Lidija Sklevicky, *Konji, zene, ratovi (Horses, Women, and Wars)* (Zagreb: Zenska Infoteka, 1996), 57.

diharapkan untuk kembali pada tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga dan berkewajiban membesarkan anak-anak mereka. Dan biasanya, mereka diharuskan mendapatkan karir yang cemerlang terlebih dahulu sebelum mereka dapat berharap untuk berpartisipasi dalam politik.

Maka dapat dimengerti, jika kaum perempuan menjadi ragu untuk keluar dari kerangka norma dan perilaku sosial tersebut terutama menghadapi penilaian patriarki dan stigma sosial. Mereka bertanggung jawab terhadap kesuksesan atau kegagalan anak-anak mereka, ditambah lagi dengan harus memperhatikan kesejahteraan seluruh keluarga. Bahkan sampai hari ini jika anak perempuan membuat kekacauan, seseorang masih akan tetap mendengarkan tetangganya berkata: “Jika ibunya mengasuhnya dengan lebih baik, maka ini tidak akan terjadi.” Namun sebaliknya, jika seorang anak sukses, maka pujian secara otomatis akan menjadi milik

ayahnya, dan kontribusi besar dari seorang ibu justru diabaikan.

Dalam keluarga-keluarga Muslim, nilai moral lebih tegas lagi, khususnya dalam penghargaan terhadap keperawanan dan etika kesopanan kaum perempuan. Maka tidak mengejutkan, jika keperjakaan dan kesopanan seorang pria tidak pernah menjadi topik pembahasan. Seperti sebuah ungkapan dari Pribahasa yang populer: “aib laki-laki bisa dihilangkan dengan sekaleng air, namun jika perempuan yang mendapatkan aib, maka itu tidak bisa dihilangkan walau dengan sepenuhpenuhnya air sungai.”⁴⁹ Jelas patriarki menghasilkan solusi *win-win* untuk pria. Perempuan berkewajiban menjaga nilai-nilai moral dan di atas semua itu dia wajib mematuhi apapun perintah suami mereka. Standar ganda moral ini mengakar dalam kebijakan gender dan budaya, yang mengharuskan kaum perempuan harus beradaptasi dengan dominasi pria. Tidaklah heran ketika perkosaan massal adalah

⁴⁹ Ibid

dipilih sebagai alat yang paling representatif untuk menghancurkan keluarga-keluarga muslim dan populasi di Bosnia dan Herzegovina.

Citra Perempuan sebagai ‘Harga Diri Bangsa’

Pada awal tahun 1990an Republik Yugoslavia, termasuk Bosnia dan Herzegovina, menyelenggarakan pemilu multi partai untuk pertama kalinya. Sebagai hasilnya, negara bergerak berdasarkan partai-partai politik yang berkuasa, menandakan era baru bagi transisi politik dan ekonomi. Akibatnya adalah, pemilu multipartai dirancang sebagai langkah sistematis disintegrasi Yugoslavia-atas nama konsep nasionalistik dan ambisi teritorial, terutama dari Serbia kemudian Kroasia.⁵⁰ Tahun 1990an membawa perubahan dalam konsep ‘demokrasi’. Perubahan-perubahan ini, dibungkus dalam baju nasional, dan kaum

perempuan adalah golongan yang paling merasakan dampaknya-kaum perempuan menjadi pilihan pertama kali untuk dipecat dan menjadi pilihan terakhir kali untuk dipekerjakan kembali.⁵¹ Pemisahan “kebebasan politik” dari sistem yang aman dan stabil yang eksis di bawah sosialisme menjadi tidak berarti bagi seluruh populasi. Namun, perempuan merasa tantangan-tantangan baru ini harus tetap bertahan.

Selama era komunis di awal berdirinya Yugoslavia, citra perempuan sebagai “pekerja” dan pendukung sistem sosialis telah lama dimengerti. Dalam periode transisional di awal tahun 1990an, status perempuan didefinisikan kembali berdasarkan formasi kebijakan negara-bangsa. Wacana-wacana mediasi ekonomi dan politik dan penguatan identitas gender dimunculkan. Secara umum, masyarakat

⁵⁰ Ivo Banac, *Cijena Bosne (The Price of Bosnia)* (Sarajevo: Vijeće kongresa bosnjackih intelektualaca (Council of the Congress of Bosniak Intellectuals, 1996).

⁵¹ See Martina, Belic, *Zene i rad (Women and Work)*, (Zagreb: B. A. b. e., 2000); Zilka Spahic-Siljak, “Political Representation of Women in Croatia : Analysis of the Sociocultural, Socioeconomic, and Political Obstacles for Full Representation of Women in Politics,” M.A. thesis, CIPS, University of Sarajevo (International Master’s Program Sarajevo- Bologna), 2001 – 2002, 48.

dibawa pada perubahan-perubahan tersebut, sebagai upaya untuk menghubungkan nilai-nilai sekarang dengan tradisi budaya masa lalu dan mengeksplorasi sumber-sumber daya baru untuk melegitimasi kekuasaan-dan perempuan menjadi tokoh sentral untuk menciptakan identitas baru ini. Namun sayangnya, pada awal berdirinya Yugoslavia, transisi justru diikuti oleh konflik yang mengerikan dan kejahatan perang yang luar biasa, di mana perempuan justru dieksploitasi dan disalahgunakan demi menciptakan citra bangsa yang baru.

Dari perspektif Kroasia, Vesna Kesic mencatat bahwa perempuan menjadi simbol, pembedaan etnis dan ideologi,⁵² bagi republik-republik Yugoslavia yang lain. Jangankan menjadi model pekerja Yugoslavia dan pendukung tatanan sosial, perempuan justru didefenisikan kembali melalui citra baru dalam rangka

pencapaian kepentingan-kepentingan etnonasional. Kepentingan-kepentingan ini menempatkan perempuan dalam peran “produsen” tidak hanya bagi bangsa dan anggota-anggota barunya, namun juga batasan-batasannya. Perempuan direpresentasikan sebagai penghantar budaya dan nilai-nilai budaya, serta sebagai partisipan kunci dalam perjuangan bangsa melawan “yang lain”.⁵³ Proses ini menghasilkan penyalahgunaan perempuan untuk tujuan ideologi etnonasional dan ambisi-ambisi etnis.

Kesic, dalam menganalisa transformasi yang muncul di tataran nasional dan kerangka kerja Kroasia, mengamati bahwa kaum perempuan dipandang sebagai “Harga Diri Bangsa”. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa proses yang sama berkembang di Serbia dan Bosnia-Herzegovina. Dalam tahap awal, wacana politik nasionalistik mendefinisikan perempuan sebagai “Ibu

⁵² Vesna Keswic, “Gender and Ethnic Identities in Transition : The Former Yugoslavia- Croatia,” in *From Gender to Nation*, ed. Rada Ivekovic and Julie Mostov (Ravena : Longo Editore, 2001), 65.

⁵³ Floya Anthias and Nira Yuval- Davis, *Introduction to Woman- Nation State*, ed. Nira Yuval- Davis and Floya Anthais (London: Macmillan, 1989), 6- 11.

Bangsa”,⁵⁴ “Ibu Penjaga”,⁵⁵ “Ibu Tanah Air” dan “paradigma etika etnis” (perempuan sebagai pelindung marwah etnonasional). Proses ini diterima sebagai bagian bahwa perempuan adalah figur suci. Sebagai konsekuensinya, status perempuan secara efektif menjadi berkurang kecuali fungsi reproduksi dan peran sebagai penjaga anak.

Lebih lanjut, perempuan diharapkan untuk menerima kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan memenuhi kewajiban untuk menghasilkan anak laki-laki/tentara dan anak perempuan/ibu-ibu muda bagi bangsa. Dengan demikian, perempuan tidak lagi memiliki hak individu sebagai pribadi selain produsen pejuang pembela bangsa. Identitas mereka hanya terikat pada unit keluarga: keluarga adalah metafora bangsa dan nafas bangsa yang memberi kehidupan bagi warganya, namun justru di saat yang bersamaan, negara juga menjadi satu-satu

entitas kehidupan sosial yang mewajibkan warganya untuk melayani negara secara totalitas.⁵⁶

Dalam waktu singkat, perempuan berada pada posisi subordinat dari tujuan-tujuan negara; kepentingan nasional mengambil alih semua hak dan keinginan individu. Ini logika yang sama ketika Partai Komunis mendapatkan tujuan-tujuannya selama periode sosialis. Orang dapat mengamati bahwa ideologi-ideologi nasionalistik memanipulasi dengan membangun dikotomi gender. Perbedaan peran gender ditransfer secara sempurna dalam diskursus nasional Yugoslavia dan masing-masing individu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan peran masing-masing. Perempuan sebagai “Ibu Bangsa” ditujukan untuk menghubungkan warga negara melalui hubungan darah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anelka Milic, “ bahwa karena “hubungan darah” ikatannya lebih kuat dibanding

⁵⁴ Kesic, “ Gender and Ethnic Identities in Transition, “ 65.

⁵⁵ Anelka Milic, *Zene, politika, porodica* (Women, Politics, Family) (Belgrade : Institute for Political Studies, 1994), 155.

⁵⁶ Ibid., 149.

hubungan agama dan spiritual di antara bangsa yang sama atau anggota kelompok etnis, maka perempuan dijadikan sebagai “fondasi dasar” pembentuk identitas budaya dan keberlangsungan sebuah bangsa.”⁵⁷ Garis ibu, dianggap sebagai sesuatu yang esensial untuk membangun identitas negara bangsa, yang didukung secara institusional dan politik melalui beragam kampanye. Di Kroasia, negara mengkampanyekan bahwa: “Semua perempuan Kroasia wajib memberikan kelahiran bagi sedikitnya empat orang putra-putri Kroasia.”⁵⁸ Seorang pendeta Katolik, Don Ante Bakovic, meluncurkan Gerakan Masyarakat Kroasia (*Pokret hrvatskog pučanstva*), yang mendukung kebijakan pro-kehidupan dan secara terbuka mengekspresikan kritisme dan menolak pasangan tanpa anak.⁵⁹ Program yang sama dari politik etnonasional juga

ditemukan di Serbia (Orthodox) dan populasi Bosnia (Muslim).

Dalam waktu singkat, proyek pro-kehidupan dijalankan di Serbia, yang secara jelas mengumumkan argumen nasionalistik bahwa: “Dalam rangka untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara, maka setiap perempuan harus melahirkan anak sedikitnya berjumlah tiga orang.”⁶⁰ Komunitas Islam di Bosnia dan Herzegovina meresponnya dengan cara yang berbeda, di mana kebijakan program pro-kehidupan justru dikampanyekan oleh komunitas-komunitas agama. Namun, komunitas Islam juga harus menghadapi berbagai tekanan dari kelompok nasionalis. Pimpinan Ulama Bosnia dan Herzegovina, Mustafa Cerić yang terpilih (pada tahun 1993) secara agresif membuat kebijakan sebagai berikut: “saya merekomendasikan warga Muslim Bosnia dari Timur (Mashriq) sampai ke Barat (Maghrib) dimana pun mereka berada saat

⁵⁷ Ibid., 55.

⁵⁸ Kesic, “gender and Ethnic Identities in Transition,” 65.

⁵⁹ SABINA ramet, *Religious and Politics in Times of Change : Catholic and Orthodox Churches in Central and Southeast Europe*, trans. Jasminka Bosnjak (Belgrade : Center for Women’s Studies, 2006), 106.

⁶⁰ Wendy Bracewell, “Women in Transition to Democracy in South- Eastern Europe,” in *The Balkans: A Religious Backyard of Europe*, ed. J. M. Faber (Ravena : Longo Editore, 1996), 215.

ini, demi rasa cinta kepada Bosnia dan ibu-ibu mereka, untuk kembali ke Bosnia. Fatwa akan segera keluar bagi perempuan Muslim untuk melahirkan lima orang anak.”⁶¹ Meskipun Komunitas Muslim tidak pernah membentuk institusi apapun atau fatwa resmi yang mendukung kelahiran anak, para imam tertentu mengharuskan perempuan Muslim untuk membangun kembali bangsa Bosnia. Rekomendasi-rekomendasi ini tidak pernah membawa konsekuensi serius, atau berhasil mendukung kebijakan pemerintah atau proyek-proyek nonpemerintah. Namun masalah demografi berhasil menjadi isu politik, yang menimbulkan emosional mendalam sebagai genderang peringatan perang yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan massal dan eksodus besar-besaran.

Dalam kondisi seperti itu, perempuan diminta untuk mengorbankan diri mereka dan pada akhirnya, dewan nasional berjanji untuk melindungi dan

menghormati mereka sebagai Ibu Bangsa. Kaum pria juga diharapkan untuk mematuhi tujuan nasional yang lebih tinggi sebagai bapak bangsa. Kewajiban mereka adalah “menyatukan teritori, memerintah dan mengaturnya, dan menjaga serta melindunginya dari serangan musuh.”⁶² Mereka dipaksa untuk membunuh, menghancurkan, dan memperkosa, semua demi kepentingan harga diri bangsa. Karena tubuh perempuan dianggap sebagai teritori, kekerasan terhadap teritori tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan atau sebuah kemenangan-tergantung dari sisi mana orang memandangnya.

Karena patriarki melekat di semua masyarakat wilayah Eropa Timur, tubuh perempuan secara tradisional berada di bawah pengawasan laki-laki. Meskipun kaum sosialis mempromosikan kesetaraan gender, mayoritas perempuan justru tidak pernah hidup sesuai dengan model tersebut. Sebagai hasilnya, yang ada

⁶¹ Ibid

⁶² Milic, Zene, *politika, porodica*, 154.

adalah penyimpangan model selama tahun-tahun kepemimpinan Komunis. Pada era yang tidak stabil ini, elit-elit nasional berusaha untuk “menyembuhkan krisis moral” yang dihasilkan oleh sistem komunis, khususnya yang terkait dengan keluarga. Ada beberapa elemen agama yang sangat mendukung usaha para elit ini. Politisi dari kelompok Konservatif mengingatkan bahwa sosialisme telah menghancurkan nilai-nilai tradisional keluarga. Demi membangun masyarakat demokratis yang sehat (sebagai sebuah persyaratan membangun bangsa), perempuan harus kembali pada peran tradisional mereka. Sebagai tambahan, untuk penyelamatan bangsa, perempuan diharuskan kembali pada posisi “kodratnya”-berada di rumah dan bersama keluarga. Konsekuensi upaya kaum nasionalis ini memunculkan beberapa program. Pada awal tahun 1990an menjadi era di mana terjadi pengurangan yang signifikan dalam jumlah perempuan di kehidupan publik dan politik hingga hanya

mencapai 2 sampai dengan 4 persen saja.⁶³ Perempuan kehilangan pekerjaannya dan dipaksa masuk dalam isolasi, dan tidak memiliki ruang privasi dalam hidupnya: “dalam kerangka pemikiran nasionalistik bangsa dan negara, perempuan dipisahkan dan dibedakan dari status kewarganegaraan penuh dan dari distribusi kekuasaan.”⁶⁴ Ketika perang berakhir pada tahun 1995, kaum perempuan kembali berjuang untuk mendapatkan hak mereka sebagaimana yang mereka dapatkan lima belas tahun sebelumnya dan berupaya menghapus citra sebagai “Ibu Bangsa” dan “Harga Diri Bangsa”.

Transformasi ke Citra sebagai Aib Negara

Selama perang, perempuan di Bosnia, Herzegovina, dan negara-negara tetangga dijadikan subjek pemerkosaan massal dan beragam bentuk kekerasan seksual secara luas karena mereka

⁶³ Spahic- Siljak, “Political Representation of Women in Croatia,” 49.

⁶⁴ Kesic, “Gender and Ethnic Identities in Transition,” 80.

dianggap sebagai target yang lemah, tidak lebih sebagai objek untuk direndahkan dan dihancurkan. Meskipun praktek perkosaan massal marak terjadi, dan beragam kekerasan seksual lainnya, tetapi hal ini justru kurang mendapat perhatian. Terlihat dari testimoni perempuan yang selamat di kamp-kamp perang: kekerasan seksual juga melebar pada kekerasan prostitusi, perbudakan seksual, pemaksaan kelahiran, pemaksaan terhadap kehamilan, sterilisasi, perdagangan orang, dan penanganan kesehatan yang menyimpang.⁶⁵

Tidak dapat dibantah, beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, termasuk pemerkosaan massal telah terjadi selama perang untuk menteror masyarakat. Selama periode perang 1992-1995 di *former* Yugoslavia, kejahatan ini terjadi berulang-ulang. Dimensi gender dalam perang; bersama-sama dengan pembunuhan massal dan penghancuran sistematis terhadap warisan budaya di

Bosnia-Herzegovina, dan negara-negara tetangga-dengan kata lain proyek penghancuran etnis dan eksistensi mereka. *Women in Black*, NGO yang berbasis di Belgrade, sangat intens menyerukan kepedulian publik terhadap kejahatan ini. Melalui kampanye di jalan-jalan dan aktivitas mereka, NGO ini dianggap sebagai NGO yang penuh dengan aktivis HAM dan pelindung keadilan. Salah satu pemimpin mereka, Stasa Zajovic, memandang pembersihan etnis tidak hanya sebagai “akibat tapi lebih kepada tujuan utama perang”. Elaborasi isu pembersihan etnis, Zajovic menambahkan bahwa “pembersihan bahasa (Bosnia/Serbia/Kroasia) adalah kata yang tepat untuk menghancurkan bangsa ini.”⁶⁶

Akibatnya adalah, pembersihan teritori nasional dan kekerasan terhadap tubuh perempuan (yang dianggap sebagai teritori), menjadi satu-satunya ideologi yang diusung nasionalis. Meskipun perkosaan dan kekerasan seksual muncul

⁶⁵ Marie Vlachova and Lea Bionson, *Women in an Insecure World: Violence Against Women, Facts, Figures, and Analysis* (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005), 113.

⁶⁶ Stasa Zajovic, “Abuse of Women on a National and Militarist Basis,” in *Women for Peace* (Belgrade: Women in Black, 1995), 176-177.

di semua republik Yugoslavia, aksi ini diyakini dilakukan oleh “tentara Serbia dan juga Kroasia dalam rangka melawan etnis-etnis yang lain.”⁶⁷ Perempuan Muslim secara khusus menjadi simbol atas penderitaan dan perkosaan massal. Ribuan perempuan diperkosa, disiksa dan disimpan dalam kamp-kamp perang sampai mereka hamil agar dapat memberi “tentara-tentara baru”. Karena adanya dimensi etnis dari perkosaan, kaum feminis menamakan tindakan ini sebagai “kekerasan gender”. Hal ini mengakar pada nilai sistem patriarki di mana perempuan diperlakukan sebagai properti atau wilayah teritori pria, negara atau masyarakat. Tipe kekerasan ini terkait dengan kekuasaan, dan kaum feminis berpendapat bahwa “perkosaan adalah cara yang dipakai untuk membuktikan power dan membangun hirarki kekuasaan”.⁶⁸

⁶⁷ Elissa Helms, “Gendered Visions of the Bosnian Future: Women’s Activism and Representation in Post War Bosnia- Herzegovina,” Ph. D. Dissertation, University of Pittsburgh, 2003, 6.

⁶⁸ Mirko Petrovic, “O povijesnom revizionizmu Vesne Kesic” (On the Historical Revisionism)

Poin penting yang harus dicatat bahwa selama periode (awal 1990an), hukum internasional tidak mengakui perkosaan sebagai suatu tindakan kriminal yang sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itulah mengapa dibutuhkan waktu bertahun-tahun membawa kasus ini sebelum sampai ke pengadilan.⁶⁹ Kekerasan seksual dan pemerkosaan biasanya hanya dianggap sebagai kasus individu dan tidak dianggap sebagai alat strategis yang sistematis untuk penghancuran kelompok etnis dan bangsa. Hanya setelah peristiwa Rwanda, Kosovo, dan Bosnia Herzegovina komunitas dunia mulai bisa mengetahui proporsi dan konsekuensi dari kejahatan-kejahatan ini. Pada akhir abad 21, di bawah tekanan dari aktivis HAM dan organisasi-organisasi feminis, masyarakat dunia memutuskan untuk mengklasifikan perkosaan sebagai sebuah kejahatan perang.

⁶⁹ Rebeka Anic, *Nasilje nad zenema u obitelji : teolosko- pastoralni vid* (Domestic Violence: Theological- Pastoral Perspective) (Split: Franciscan Institute for Culture of Peace, 2006), 91.

Orang harus memahami upaya media internasional dan organisasi-organisasi HAM untuk membangkitkan kepedulian terhadap kasus perkosaan dan penyiksaan terhadap perempuan di kamp-kamp perang. Sebagai contoh, Amnesty Internasional memerintahkan melalui investasi mendalam terhadap kejahatan-kejahatan ini dan memberikan fasilitas kepada para korban yang mau memberikan testimoni sebagai bukti yang bisa digunakan untuk menghukum para penjahat perang. Laporan-laporan yang diperoleh membuktikan bahwa perkosaan massal telah dilakukan secara sistematis: bukti-bukti yang didapat mendukung dan mengindikasikan bahwa beberapa kasus perkosaan perempuan memang diorganisir. Insiden-insiden yang melibatkan perempuan sebagai target adalah sebuah pola dalam peperangan, dengan karakteristik mengintimidasi dan menyiksa kaum muslim dan Kroasia yang menyebabkan penduduk bangsa tersebut

keluar dari negaranya karena rasa takut akan terjadinya kekerasan selanjutnya.⁷⁰

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, perkosaan dan bentuk kekerasan brutal seksual dilakukan oleh semua pihak (Serbia, Kroasia dan Bosnia) dalam perang, namun Amnesty Internasional melaporkan secara jelas bahwa perempuan muslim Bosnia adalah korban utama dan tentara Serbia adalah pelaku utama. Tidak hanya Serbia yang menyangkal tuduhan ini, namun mereka juga mencoba membalas bahwa negara tetangganya juga melakukan kekerasan terhadap perempuan mereka. Dalam waktu singkat, Serbia mengklaim bahwa semua pihak yang terlibat dalam perang memiliki kesalahan yang sama.⁷¹ Dua pengadilan internasional didirikan untuk menghukum para penjahat perang di Yugoslavia.

International Criminal Tribunal for former

⁷⁰ Amnesty International, Bosnia- herzegovina: Rape and Sexual Abuse by Armed Forces. Report, January 21, 1993.

⁷¹ Jasna Baksic Muftic, "Zlocin silovanja- lokalna i me. Unarodna dimenzija" (The Crime of Rape in Bosnia – herzegovina : Local and International Dimensions), in *Izazovi Feminizma* (The Challenges of Feminism), ed Jasminka BABIC-Avdispahic et al. (Sarajevo : IF Bosnae, 2004), 52.

Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal Court* (ICC) menginvestigasi sejumlah kasus, yang berhubungan erat dengan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perkosaan. ICTY menetapkan tiga warga Bosnia Serbia (Zoran Vuković, Radomir Kovać, and Dragoljub Kunarac) melakukan perkosaan massal terhadap perempuan-perempuan muslim Bosnia yang rata-rata berusia muda antara dua belas dan lima belas tahun. Hal ini cukup mengejutkan, karena, “ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional memberikan hukuman ganda kombinasi dari perbudakan seksual dan perkosaan sebagai sebuah kejahatan perang yang melanggar etika kemanusiaan.”⁷²

Pengadilan Kejahatan perang Bosnia dan Herzegovina diberikan mandat untuk menghukum kasus-kasus kejahatan perang, dan pada tahun 2006 sudah ada penjahat perang yang dipenjara selama dua

puluh empat tahun atas kejahatan perang; perkosaan dan penyiksaan bernama N. Samardzic.⁷³ Perlu dicatat, sejak hukuman tersebut dijalankan, jumlah kekerasan seksual berdasarkan gender tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sarajevo, yang memiliki organisasi perempuan korban perang memprotes keras karena persentasenya hanya sedikit sekali kasus-kasus kekerasan seksual tersebut yang diproses hukum. Hal ini karena tidak adanya perlindungan bagi saksi di pengadilan, sehingga membuat para perempuan yang menjadi korban tersebut tidak bersedia menjadi saksi.⁷⁴

Ada perbedaan persepsi antara korban, kelompok-kelompok nasional (masyarakat Bosnia, Kroasia dan Serbia) serta komunitas internasional mengenai akibat dari kekerasan seksual dan pemerkosaan di Bosnia dan Herzegovina. Bagi mayoritas korban, diskusi mengenai kejahatan ini tidak pernah akan memberi

⁷² International Justice Failing Rape Victims, prepared by IWPR staff in the Hague, London, and Sarajevo, January 5, 2007. www.iwpr.net/?p=tri&s=f&0=328311&apc_state=henitri2007.

⁷³ Merdijana Sadovic, Foca Rape Sentence, IWPR, December 15, 2006. www.iwpr.net/?p=tri&s=f&0=326212&apc_state=henitri200612.

⁷⁴ Ibid

ruang pilihan, baik stigma sosial, “aib” dan “rasa bersalah” yang terkait dengan tindakan tersebut. Dalam budaya masyarakat Bosnia dan Herzegovina, khususnya, kaum perempuan telah dilekatkan sebuah peran sebagai penjaga nilai-nilai moral dan virginitas. Oleh karena itu, kekerasan seksual yang mereka alami, membuat mereka terhempas dari masyarakatnya karena dianggap tidak mampu menjalankan peran mereka (menjaga virginitas). Agar bisa kembali diterima di masyarakat dan keluarga, mereka harus menyembunyikan perasaan dan penderitaan mereka.⁷⁵ Standar ganda moral dari masyarakat patriarki di hidup mereka, membuat sedikit sekali kaum perempuan yang berani melaporkan kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi pada mereka. Siapa yang ingin berhubungan dengan keluarga dari perempuan yang menjadi korban perkosaan, siapa yang berniat untuk

merencanakan pernikahan atau menjalin bisnis dengan mereka dalam masyarakat yang mengusung nilai-nilai moral tersebut? Maka tidak mengherankan, budaya dalam sistem patriarki yang memberikan label “salah dan aib”, membuat para korban tersebut tidak ingin berbagi pengalaman mereka yang mengerikan itu kepada siapa pun.

Ada juga sejumlah perempuan yang bersedia untuk melaporkan pengalaman tragis mereka kepada aktivis perempuan /NGO atau pusat-pusat investigasi kejahatan perang dengan harapan masyarakat dunia akan memberi bantuan dan mengatasi kejahatan perang di Bosnia dan Herzegovina. Hanya dengan cara ini para perempuan korban kekerasan seksual ini bisa sedikit mendapatkan perlindungan moral. Namun tanpa adanya keluarga dan komunitas yang mendukung, mereka tetap diisolasi dan ditinggalkan, sekali lagi korban, dianggap sebagai aib. Tanpa adanya pengertian komunitas, tanpa adanya dukungan psikologi yang tepat,

⁷⁵ Dardic dragana, “ Domestic Violence, “ in *In Depth Study on Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina* (HCA, B Luka, Zene Zenama Sarajevo, and Lara Bijelina, 2006), 31.

dan tanpa adanya penerimaan dari suami-suami mereka, wanita-wanita ini sering melihat diri mereka melalui mata masyarakat mereka, sebagai “penilai moral”. Citra mereka telah berubah dari Heroin Nasional dan Harga Diri Bangsa menjadi aib Bangsa. Mereka menjadi representasi jatuhnya Bangsa, sebuah persepsi yang dihasilkan dari perceraian dan perpisahan dengan anggota keluarga yang tidak siap dengan akibat dari adanya penyimpangan seksual, perkosaan, dan penyiksaan.⁷⁶ Meskipun banyak NGO yang berusaha untuk bekerja sama dengan para korban ini untuk mempublikasikan apa yang terjadi, namun banyak sekali dari mereka yang justru kembali lagi ke wilayahnya dan memaafkan para pelakunya. Dalam cara tertentu, komunitas Islam berusaha untuk merespon akumulasi frustrasi dan penderitaan dari para perempuan ini. Karena komunitas tidak pernah menyiapkan metode untuk menghadapi isu-isu ini, mereka

memutuskan untuk mengirim pesan bahwa perempuan-perempuan yang menjadi korban perkosaan ini harus dianggap sebagai heroin. Pesan ini memberi rekomendasi bagi anggota keluarga dan masyarakat untuk menerima dan menolong para perempuan tersebut untuk sembuh dari trauma mereka. Hal ini pada awalnya mendapat sambutan yang positif namun kembali lagi berubah dalam waktu singkat, di mana tidak ada yang memberi bantuan yang konkret.

Intelektual-intelektual muslim mengkritisi kebisuan dan perbedaan respon pemimpin komunitas Islam. Ilmuwan Islam Bosnia yang terkenal Enes Karic dalam sebuah wawancara yang bertema “Kita adalah yang terburuk dibanding Chetniks (sebutan untuk para penyerang Serbia),” mengungkapkan : hari ini kita memiliki ribuan perempuan yang telah diperkosa, jangan mengizinkan para reporter asing dan media untuk memberi perhatian pada masalah ini, komunitas Islam justru tidak memberi

⁷⁶Ibid

ruang bagi bagi reporter dan masyarakat yang ingin datang, untuk sekedar berbicara atau menangis bersama.⁷⁷

Meskipun media muslim (seperti *Ljiljan and Preporod*) melaporkan cerita-cerita mengenai korban perkosaan secara spesifik dan membahas publikasi para imam yang megutarakan empati terhadap para perempuan ini, hal ini masih dianggap belum cukup.⁷⁸ Akibatnya, beberapa dari korban ini merasakan bahwa perbedaan tanggapan/respon pemerintah dengan para pemimpin agama jauh lebih menyakitkan dibandingkan tindakan brutal yang mereka alami. Sekali lagi, pria bergantung pada para perempuan ini-perempuan yang sama yang dipaksa memegang peran sebagai “pelindung” nilai-nilai keluarga dan lebih luas lagi, sebagai pelindung moral dan lingkungan sosial mereka dan mempertahankan norma yang ada: “Salam saudaraku, mengapa kau tidak mencoba untuk diam dan berpikir mengenai suami dan anak-anakmu? Jika kau terus

menyuarakan apa yang kau alami, kau justru tidak akan mendapatkan apa-apa selain rasa malu”.

Sulit untuk membayangkan bahwa kaum perempuan yang telah diperkosa dan diperlakukan secara brutal kemudian dianggap tidak ada. Rada Ivekovic menuliskan bahwa: “subjektivitas perempuan tidak lagi dapat dibantah: perempuan tidak hanya menjadi korban perendahan kemanusiaan namun eksistensinya juga menjadi arena perselisihan yang mengerikan.”⁷⁹ Sistem patriarki telah memutuskan untuk menenggelamkan kaum perempuan secara perlahan dibandingkan mengobati dan memulihkan luka mereka. Dalam waktu singkat, kaum pria justru tidak bersedia bertanggung jawab atas kekalahan negara dan menghindari dari perbuatan masa lalu mereka yang melakukan perendahan dan pelecehan terhadap kaum perempuan tersebut.

⁷⁷. Ines Sabalic, “Pecar na tijelu” (Seal on the Body) *Ljiljan*, no. 20 (1993) : 13.

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

Penutup

Ketika rejim Komunis mengontrol Bosnia, Herzegovina, dan negara-negara tetangga Yugoslavia, citra kaum perempuan sebagai pekerja, proletarian, dan pendukung sistem Sosialis berjalan dengan sukses. Selama periode transisional, status perempuan didefinisi ulang-berdasarkan kebijakan ekonomi yang baru dan wacana-wacana politik nasionalistik yang memediasi dan memperkuat identitas gender. Pada akhirnya, selama periode perang, citra perempuan sebagai Harga Diri Bangsa dan Heroin Nasional ditransfer menjadi AIB sebuah Negara dan Runtuhnya Negara, sebagai hasil dari meluasnya kekerasan, penyimpangan seksual, dan pemerkosaan. Tubuh perempuan diartikan berbeda, sebagai simbol teritori nasional untuk bertarung dan mengalahkan. Meskipun kekerasan berdasarkan gender pada akhirnya diakui sebagai sebuah kejahatan perang oleh hukum internasional, tetap saja meninggalkan korban-korban

perempuan yang tidak lagi bisa bersuara, tidak memiliki *power*, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk sembuh dari trauma kekerasan dan penyiksaan seksual yang mereka alami.

Daftar Pustaka

- Amnesty International Report 1993. "Bosnia- Herzegovina : Rape and Sexual Abuse by Armed Forces." Report released January 21. Anic, Rebeka. *Domestic Violence : Theological- Pastoral Perspective*. Split : Franciscan Institute for Cultural of Peace, 2006.
- Anthias, Floya, and Nira Yuval- Davis. Introduction to *Woman- Nation State*, edited by Nira Yuval- Davis and Floya Anthias, 6- 11. London : Macmillan, 1989.
- Baksic- Muftic, Jasna. "The Crime of Rape in BiH : Local and International Dimensions." In *The Challenges of Feminism*, edited by Jasminka Babic- Avdispahic et al. Sarajevo : IF Bosnae, 2004.
- Banac, Ivo. *The Price of Bosnia* (Cijena Bosnae), Sarajevo: Council of the Congress of Bosniak Intellectuals (Vijeće kongresa bosnjackih intelektualaca), 1996.
- Belic, Martina. "Women and Work" (Žene i rad). B.a.b.e. Zagreb, 2000.
- Bracewell, Wendy, "Women in Transition to Democracy in South – Eastern Europe". In *the Balkans: A*

- Religious Backyard of Europe, edited by J. M. Faber. Ravenna: Longo Editore, 1996.
- Dardic, Dragana. "Domestic Violence." In *In Depth Study on Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina*, edited by Hca, B Luka, Zene Zenama Sarajevo, and Lara Bijeljina, 2006.
- Divicic, Marija, *Organization of AFW in Sarajevo in Socialist Yugoslavia*. Sarajevo: Historical Archive, 1988.
- Helms, Elissa. "Gendered Visions of the Bosnian Future: Women's Activism and Representation in Post-war Bosnia- Herzegovina." Ph. D. Dissertation, University of Pittsburgh, 2003.
- Innes, Sherrie A. *Tough Girls: Women Warriors and Wonder Women in Popular Culture*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991.
- Markov, Slobodanka. "Status and Role of Women in the Political Decision making System." *Sema*, no. 3 (1984).
- Ortner, Sherry B. "Is a Female to Male as Nature is to Culture?" In *Women, Culture and Society*, edited by M. Z. Rosaldo and L. Lamphre. Stanford, CA: Standford University Press, 1974.
- Ramet, Sabina. *Religion and Politics in Times of Change: Catholic and Orthodox Churches in Central and Southern Europe*. Translated by Jasminka Bosnjak, Belgrade: center for Women's Studies, 2006.
- Sabalic, Ines. "Seal on the Body." *Ljiljan* 20 (1993). Sklevicky, Lidija.
- Horses, Women and Wars*. Zagreb : Zenska Infoteka, 1996.
- Spahic, Siljak, Zilka. "Political Representation of Women in Croatia: Analysis of the Sociocultural, Socioeconomic, and Political Obstacles for Full Representation of Women in Politics." M.A Thesis, University of Sarajevo, 2002.
- Statistical Yearbook of SR Bosnia i Herzegovina, 1970, 61.
- Statistical Yearbook of SR Bosnia i Herzegovina, 1989, 83- 84.
- Stojakovic, Gordana. *Neda ; A Biography*. Novi Sad: Futura publikacija, 2002.
- Suvar, Stipe. "Discussion in Debate : Social Consciousness, Marxist Theory and Emancipation of Women Today." *Zena* 2-3 (1972).
- Vesna, Kesic." Gender and Ethnic Identities Transition: The Former Yugoslavia- Croatia." In *From Gender to Nation*, edited by Rada Evekovic and Julie Mostav. Ravenna : Longo Editore, 2001.
- Zajovic, Stasa. "Abuse of Women on National and Militarists Basis." "In *Women for Peace*. Belgrade : Women in Black, 1995.

Sumber Elektronik:

IWPR Staff. "International Justice Failing Rape Victims." The Hague, London, and Sarajevo, January 5, 2007.

www.iwpr.net/?p=tri&s=f&o=328311&apc_state=henitri2007 (diakses 21 September 2008).

Sadovic, Merdijana. "Foca Rape Sentence." IWPR, December 15, 2006.
www.iwpr.net/?p=tri&s=f&o=326212&apc_state=henitri200612
(diakses 21 September 2008).